

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Kekuatan militer yang dimiliki suatu negara dibangun untuk mempertahankan negara melawan berbagai jenis ancaman militer. Kekuatan militer merupakan ekspresi implementatif dari total kekuatan negara yang diwujudkan dalam berbagai bentuk gelar kekuatan bersenjata. Berdasarkan gagasan ini, pengembangan kekuatan militer suatu negara harus melambungkan total kekuatan nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Kegagalan suatu negara untuk membangun kekuatan militer yang tangguh, dengan demikian dapat dipandang sebagai bentuk kelemahan pemerintah nasional untuk mengalokasikan kekuatan nasional ke bidang pertahanan negara.

Penempatan kekuatan militer sebagai suatu tingkat keluaran dari kekuatan nasional yang didasari pada suatu premis universal bahwa organisasi militer

Indonesia mendapatkan dukungan alokasi sumber daya nasional dan mentransformasi sumber daya tersebut menjadi suatu kemampuan perang yang spesifik dan proses transformasi pertahanan ini menjadi indikator utama.

Sejak tahun 1990-an Amerika Serikat (AS) menerapkan embargo militer terhadap Indonesia. Akibatnya, kapabilitas persenjataan Indonesia menurun karena faktor usia peralatan, suku cadang yang kian menipis serta sudah jauh ketinggalan zaman dan teknologi, pelaksanaan embargo militer AS tersebut mengakibatkan adanya *technological imperative* bagi Indonesia.<sup>1</sup> Artinya, kemajuan teknologi khususnya di bidang militer juga dapat menjadi faktor independen mendasar yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan suatu negara.

Dengan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Hubungan Kerjasama Militer Indonesia-Cina Dalam Hal Pengadaan Alutsista”**.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa kepentingan suatu negara terhadap kerjasama bilateral.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab atau alasan mengapa Indonesia melakukan kerjasama dalam bidang militer dengan Cina.

---

<sup>1</sup> Barry Buzan dalam bukunya "An Introduction to Strategic Studies".

3. Penulisan ini juga ditujukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Perjuangan rakyat Indonesia berhasil memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan, menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat, dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Kemerdekaan dan kedaulatan negara merupakan kehormatan dan harga diri rakyat Indonesia, menjadi milik warisan bangsa yang sangat berharga dan tak ternilai. Segenap komponen bangsa Indonesia wajib untuk senantiasa menjaga serta melindungi kemerdekaan dan kedaulatannya, selanjutnya mengisi kemerdekaannya dengan pembangunan nasional. Pertahanan negara Indonesia dalam abad 21 diselenggarakan dengan tiga pilar utama yaitu: penggunaan kekuatan pertahanan, kerjasama internasional di bidang pertahanan, dan pembangunan kekuatan pertahanan. Oleh karena itu, pedoman utama penyelenggaraan pertahanan di tingkat strategis memerlukan kebijakan atas tiga pilar utama, yakni kebijakan penggunaan kekuatan pertahanan, kebijakan kerjasama pertahanan, dan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina kini makin erat. Politik yang dianut oleh Indonesia adalah politik bebas aktif, dan kerjasama militer antara kedua negara ada peluang dan tidak salah jika Indonesia melihat perkembangan

militer Cina. Beberapa waktu lalu kedua negara sepakat untuk menandatangani perjanjian kesepakatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan yang merupakan kelanjutan dari Deklarasi Bersama yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan Cina, pada tanggal 25 April 2005 dalam rangka membangun kemitraan strategis.<sup>2</sup>

Secara khusus, nota kesepakatan kerjasama militer Indonesia dan Cina antara lain meliputi, pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan industri di bidang militer.<sup>3</sup> Dengan kata lain, payung kerja sama ini sepakat untuk melakukan pendidikan dan latihan militer bersama, pengembangan industri militer dan intelijen, pertukaran teknologi dan bantuan teknis, serta produksi peralatan militer bersama.

Kalkulasi kondisi lingkungan strategis di atas dikaji jeli oleh elite militer Indonesia. Hal itu terlihat hanya dalam hitungan kurang lebih satu tahun setelah Deklarasi Bersama, Indonesia dan Cina untuk membangun kemitraan strategis, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama militer di bidang pembinaan sumber daya manusia serta pengembangan ilmu pengetahuan dan industri di bidang militer.

Peluang ini oleh Indonesia tampaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapabilitas militer Indonesia serta untuk peningkatan alutsista bagi Indonesia.<sup>4</sup> Akan tetapi Indonesia perlu memperhitungkan dua tataran strategi (mikro dan

---

<sup>2</sup> <http://www.antara.co.id/arc/2008/3/14/modernisasi-militer-china-tidak-harus-ditakuti/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2008.

<sup>3</sup> "Indonesia-Cina Kerja Sama Militer" dalam *Republika*, 15 Mei 2006.

<sup>4</sup> [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), diakses pada tanggal 14 Maret 2008.

makro) dalam melakukan kerjasama militer yang semakin erat dengan Cina. Pada tataran mikro strategi, kerjasama militer ini akan berkaitan erat dengan kondisi anggaran pertahanan Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa selama ini pembelian persenjataan militer Indonesia dengan berhutang akan mengakibatkan alokasi kredit ekspor yang sangat signifikan sehingga presentasi terhadap anggaran pertahanan terus meningkat. Misalnya saja pada tahun 2003 kurang lebih 18 sampai 20% dari utang negara adalah utang pembelian senjata.<sup>5</sup>

Di tingkat makro strategi, Indonesia perlu memperhitungkan AS yang selama ini mendominasi persediaan persenjataan militer ke Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa AS sangat tidak suka dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Cina. Pada saat pertemuan KTT Cina-ASEAN, AS khawatir akan kesungguhan Cina untuk menjalin kerja sama militer dengan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia.

#### **D. Pokok Permasalahan**

“Mengapa Indonesia perlu menjalin hubungan kerjasama militer dengan Cina?”

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk memilih konsep yang tepat dalam membentuk hipotesa, maka diperlukan suatu kerangka teoritis. Pada uraian

---

<sup>5</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/042007/20/0903.htm>, diakses pada tanggal 6 Maret 2008.

mengapa Indonesia mau bekerjasama di bidang militer dengan Cina, titik berat penulis pada tingkat politik luar negeri Indonesia dalam pencapaian tujuan nasionalnya terhadap kondisi militer di negaranya. Untuk memperjelas hal tersebut, penulis menggunakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan di atas yaitu proses pembuatan keputusan politik luar negeri Graham T. Allison.

Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (*decision maker*) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>6</sup>

Dalam studi hubungan internasional, kita dapati bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional (*rational action*) suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa.<sup>7</sup>

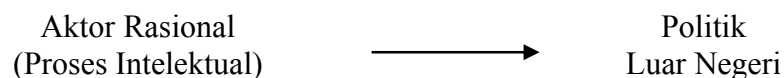
---

<sup>6</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, "*Kamus Hubungan Internasional*", Jakarta, Putra A Bardin, 1999.

<sup>7</sup> Tulus Warsito, "*Teori-Teori Politik Luar Negeri*", Yogyakarta, Bigraf, 1998, hlm. 73.

Teorisasi dalam hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Allison yang mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik. Untuk dapat menjelaskan dan menerangkan permasalahan di atas, penulis menggunakan model yang pertama, yaitu Model Aktor Rasional. Dalam proses pembuatan tulisan ini penulis menggunakan Aktor Rasional untuk dapat mempermudah mendeskripsikan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri serta mengenai fenomena perubahan politik luar negeri sebuah negara.

### **Model Aktor Rasional**



Mohtar Mas'oe'd dalam bukunya, "*Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*":

“.....politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa

diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.”<sup>8</sup>

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

**Tabel Untung Rugi**

<b>Opsi</b>	<b>Keuntungan</b>	<b>Kerugian</b>
<b>1. Alternatif A</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>
<b>2. Alternatif B</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>
<b>3. Alternatif C</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>

Sumber : Graham T. Alison, “*The Essence Of Decision*”, dikutip dari diktat perkuliahan *Teori Hubungan Internasional*, Nur Azizah, Fisipol-UMY, 2005.

---

<sup>8</sup> Mohtar Mas’oed, “*Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*”, LP3S, Jakarta, 1990, hlm. 234.



**Tabel Untung Rugi Hubungan Kerjasama Militer Indonesia-Cina  
Dalam Pengadaan Alutsista**

<b>Opsi</b>	<b>Keuntungan</b>	<b>Kerugian</b>
<b>Kerjasama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaharui peralatan militer milik Indonesia.</li> <li>• Adanya transfer ilmu dari Cina kepada Indonesia mengenai pengembangan dari industri militer untuk meningkatkan teknologi mengenai peralatan militer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia masih harus berada di bawah pengaruh Cina khususnya dalam hal pengadaan peralatan militer.</li> <li>• Kondisi pertahanan Indonesia dapat diketahui oleh Cina.</li> </ul>

<b>Opsi</b>	<b>Keuntungan</b>	<b>Kerugian</b>
<b>Menolak Kerjasama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia tidak mendapat tekanan dari Amerika Serikat yang mana peralatan militer Indonesia sendiri masih tergantung pada Amerika Serikat.</li> <li>• Meringankan Indonesia dalam hal embargo senjata yang diberikan oleh Amerika Serikat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan Indonesia dengan Cina kurang begitu baik.</li> <li>• Keutuhan NKRI akan terancam baik dari pihak luar maupun dari dalam negeri.</li> <li>• Peralatan militer Indonesia akan jauh tertinggal oleh negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN.</li> <li>• Pertahanan Indonesia sangat rapuh sekali dan dapat ditembus oleh pihak asing karena peralatan militer sudah terlampau tua.</li> </ul>

Dari tabel di atas sudah sangat jelas digambarkan bagaimana hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Cina dapat mengalami keuntungan dan kerugian, dalam hal ini posisi Indonesia memang sangat dilematis karena apabila Indonesia tidak menggalang kerjasama militer dengan Cina, maka kondisi militer Indonesia khususnya dalam pengadaan alutsista sangat sulit sekali mengingat anggaran pertahanan keamanan RI yang relatif masih sangat kecil dibanding

negara-negara asia lainnya. Trauma Indonesia akibat embargo peralatan militer dari Amerika Serikat, setidaknya juga menjadi pelajaran bagi Indonesia, untuk kemudian menjajaki negara lain seperti Cina.

Kita memang tidak boleh tergantung pada satu negara, apalagi menyangkut soal peralatan persenjataan. Pilihan Indonesia terhadap Cina, karena alat utama sistem senjata (alutsista) negara itu tergolong cukup canggih dengan anggaran yang relatif kecil serta kualitas militer sudah mampu mengimbangi Amerika Serikat dan Rusia.

#### **F. Hipotesa**

Dari dasar pemikiran yang telah diterapkan, dalam penelitian tentang hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Cina dalam hal pengadaan alutsista, maka penulis sampai pada hipotesa yaitu:

1. Kerjasama dengan Cina, Indonesia dapat menerima transfer ilmu di bidang industri militer serta memperbaharui peralatan militer milik Indonesia.
2. Secara politis, kerjasama alutsista Indonesia dengan Cina tidak berdampak dengan intervensi Cina terhadap Indonesia.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder, dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi: literatur yang relevan, surat kabar, dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.
3. Metode berdasar hubungan dengan obyek penelitian adalah *unobtrusive* yaitu *historical comparative research*, dengan melihat dari pendekatan sejarah dalam penjabarannya untuk mengkaji peristiwa berdasarkan kesinambungan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang.

#### **H. Jangkauan Penelitian**

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka perlu ditetapkan jangkauan penulisan, maka penulis hanya membatasi jangkauan penelitian pada bidang kajian tentang hubungan kerjasama militer antara Indonesia dengan Cina dalam hal pengadaan alutsista pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, namun tidak menutup kemungkinan pembahasan penulisan di luar dari jangkauan tersebut.

#### **I. Sistematika Penelitian**

Agar mudah dipahami, maka karya tulis ini dibagi secara sistematis menjadi lima bab antara lain sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari: alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan.
- Bab II. Memaparkan dinamika hubungan dan kerjasama militer Indonesia-Cina.
- Bab III. Menjelaskan tentang perkembangan militer Indonesia.
- Bab IV. Membahas mengenai mengapa Indonesia perlu menjalin hubungan kerjasama militer dengan Cina, khususnya dalam hal pengadaan alutsista.
- Bab V. Penutup atau Kesimpulan, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.